



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

LAKIP 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II PADANG

KATA PENGANTAR



Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kinerja dari Kementerian Kesehatan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Kelas II Padang Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2019 dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait.

Semoga segala upaya yang telah kita lakukan mendapat rahmat dan ridho-Nya.

Padang, 25 Januari 2020
Kepala KKP Kelas II Padang,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP. 196603111999031001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2019. Rencana kinerja 2019 dan perjanjian kinerja 2019 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 – 2019 yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang telah memenuhi sasaran yang ditargetkan dan menunjukkan peningkatan capaian kinerja target yang ditetapkan. Realisasi pencapaian target indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dari 12 indikator, ada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu indikator jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaandan indikator Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan kedatangan dan keberangkatan kapal di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang serta dampak dari Permenkes No.23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi International dimana vaksinasi international serta penerbotan ICV tidak lagi hanya di Kantor Kesehatan Pelabuhan namun juga dapat dilaksanakan di Klinik swasta berizin. Dan terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan sehingga rata-rata capaian indikator kinerja Tahun 2019 sebesar 127,42%

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang pada Tahun 2019 mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp. 16.117.323.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.966.697.568,- atau 99,06%.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Visi dan Misi	1
B. Latar Belakang	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Sumber Daya	6
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	11
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	59
BAB IV. PENUTUP.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas II Padang	5

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Distribusi Pegawai KKP Klas II Padang	7
2. Tabel 1.2 Distribusi Anggaran Berdasarkan Jenis kegiatan	9
3. Tabel 2.1 Matrik rencana Aksi kegiatan (RAK) tahun 2015-2019.....	13
4. Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2018.....	15
5. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	17
6. Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator Kegiatan.....	18
7. Tabel 3.2 Distribusi Dokumen Dukungan Manajamamen dan Tugas Teknis Lainnya	55
8. Tabel 3.3 Distribusi Pelatihan Tahun 2018.....	56
9. Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Pengadaan Tahun 2018	58
10. Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output tahun 2018.....	59
11. Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2018.....	60
12. Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan Tahun 2018 .	60
13. Tabel 3.8 Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	61

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Grafik 1.1 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang Tahun 2018	6
2. Grafik 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018	6
3. Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Seksi/ Subbag Tahun 2018.....	7
4. Grafik 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas Tahun 2018	8
5. Grafik 1.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	8
6. Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator I	20
7. Grafik 3.2 Trend Jumlah Alat Angkut sesuai dengan Standar Kekakarantinaan Kesehatan Tahun 2014 – 2019	21
8. Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kesatu	21
9. Grafik 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kedua	24
10. Grafik 3.5 Trend Pelaksanaan Indikator Kedua	25
11. Grafik 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ketiga	28
12. Grafik 3.7 Tend jumlah Indikator Ketiga	29
13. Grafik 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator	29
14. Grafik 3.9 Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus.....	32
15. Grafik 3.10 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Keempat	33
16. Grafik 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kelima	35
17. Grafik 3.12 Target dan Realisasi Indikator Keenam	38
18. Grafik 3.13 Perbandingan Target dan realisasi Indikator keenam	39
19. Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Ketujuh	41
20. Grafik 3.15 Perbandingan Target dan realisasi Indikator ketujuh	41
21. Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kedelapan	43
22. Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi Indikator Kesembilan.....	44
23. Grafik 3.18 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Indikator Kesembilan	46

24. Grafik 3.19 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kesepuluh	48
25. Grafik 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kesepuluh	48
26. Grafik 3.21 Capaian Target dan Realisasi Indikator Indikator Kesebelas	57
27. Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kedelapan Keduabelas	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal P2P 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi tersendiri, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Dengan demikian visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang juga mengikuti visi tersebut.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui misi pembangunan yaitu:

- a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya *preventif* dan *promotif*.

Sejalan dengan Misi Kementerian Kesehatan, maka untuk mewujudkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, misi yang dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan Kinerja Pengendalian Karantina dan Surveillance Epidemiologi.
- b. Meningkatkan Kinerja Pengendalian Risiko Lingkungan.
- c. Meningkatkan Kinerja Unit Kesehatan Lintas Wilayah.
- d. Meningkatkan Kinerja Dukungan Manajemen

B. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance/* tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus *result oriented government /*pemerintah yang berorientasi pada output/ outcome. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan (*Performance-base Management*) pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran setiap tahunnya.

Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis (posisi silang), berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan, serta perkembangan teknologi transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antar negara melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular (*new infection diseases, emerging infections diseases, dan re-emerging infections diseases*), dimana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala klinis penyakit belum tampak. Disamping kemajuan teknologi diberbagai bidang lainnya yang menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit, ditandai dengan pergerakan kejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya, baik pergerakan secara alamiah maupun pergerakan melalui komoditas barang di era perdagangan bebas dunia yang dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KKP Kelas II Padang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkes 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja KKP Kelas II Padang Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala KKP Kelas II kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 dan perubahannya Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka KKP Kelas II Padang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas II Padang menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

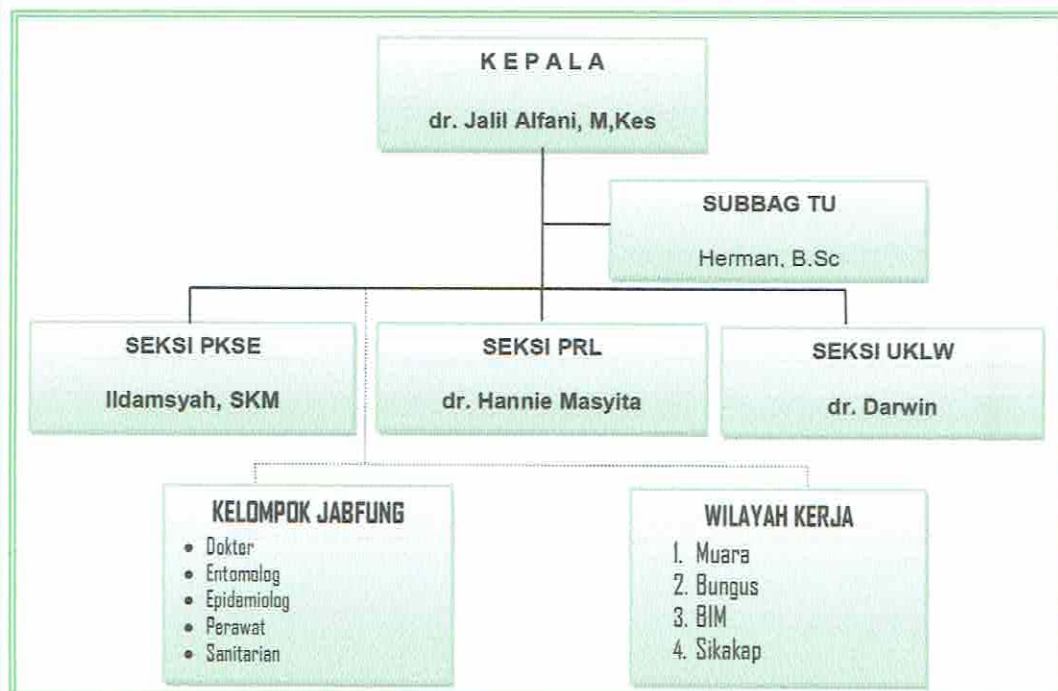
E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tatakerja KKP Kelas II Padang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas II Padang terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
5. Wilayah Kerja
6. Instalasi
7. Kelompok jabatan fungsional

Selengkapnya tentang struktur organisasi KKP Kelas II Padang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KKP Kelas II Padang



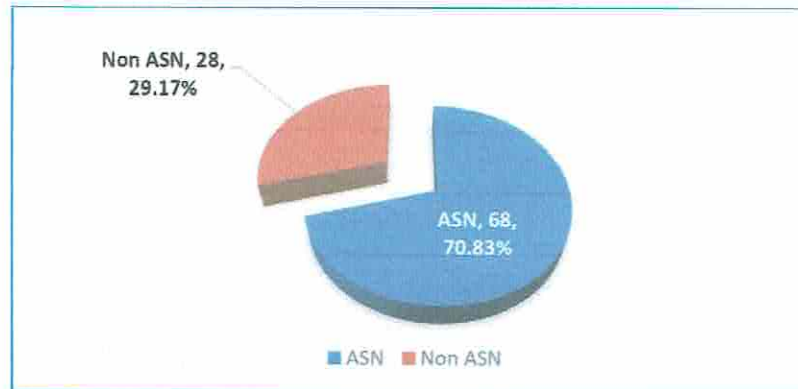
F. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pegawai KKP Kelas II Padang sebanyak 101 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

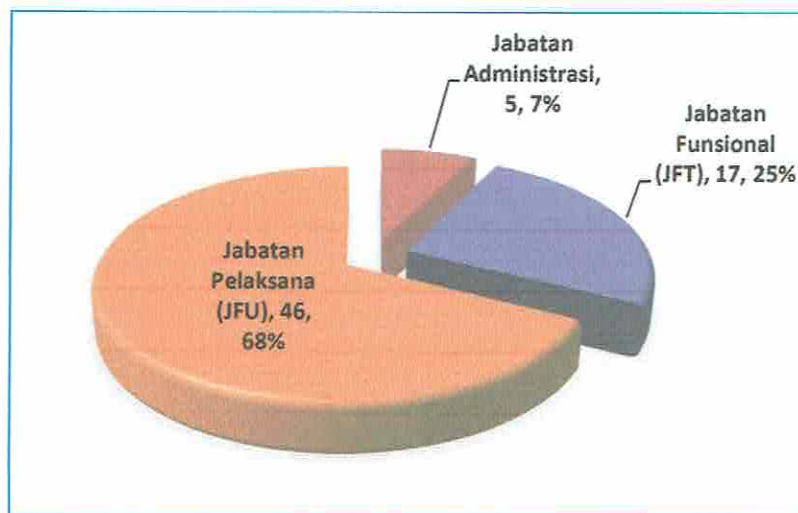
Grafik 1.1
Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019



Pada tahun 2019 jumlah pegawai KKP Kelas II Padang yang ASN/ PNS sebanyak 68 orang (70,83%) dan honorer sebanyak 28 orang (29,17%).

b. Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

Grafik 1.2
Distribusi Pegawai ASN KKP Kelas II Padang
Berdasarkan Jabatan Tahun 2019



Pada tahun 2019 jumlah pegawai KKP Kelas II Padang sebagian besar (68%) adalah dengan jabatan fungsional umum hanya 17 orang (25%) dengan jabatan fungsional tertentu.

c. Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

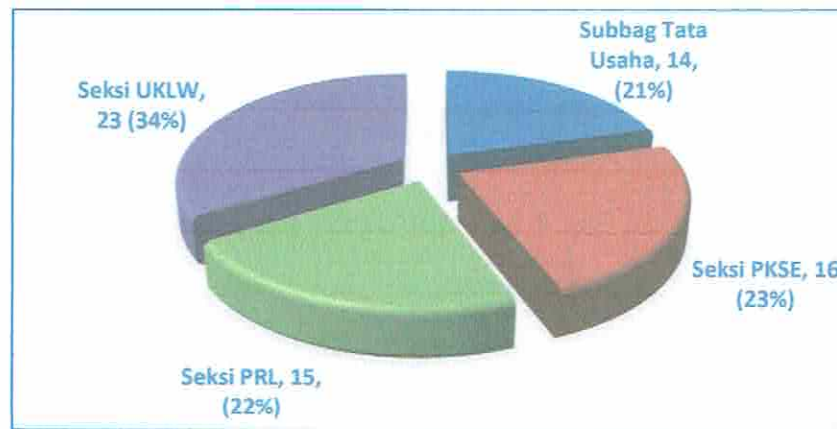
Tabel 1.1
Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV.b	1	1%
2	IV.a	5	7%
3	III.d	10	15%
4	III.c	10	15%
5	III.b	9	13%
6	III.a	17	25%
7	II.d	14	21%
8	II.b	1	1%
9	I.b	1	1%
Jumlah		68	100

Dari table 1.1 dapat diketahui, bahwa pegawai KKP Kelas II Padang paling banyak mempunyai pangkat Penata Muda golongan III a, yaitu sebanyak 17 orang (15%), kemudian golongan Penata / IIIc dan Penata Tk.I/ III/d sebanyak 10 orang (15%) dan paling sedikit adalah dengan golongan IV/b, II/b dan I/b masing-masing 1 orang (1%).

d. Distribusi Pegawai Berdasarkan Seksi/ Subbag

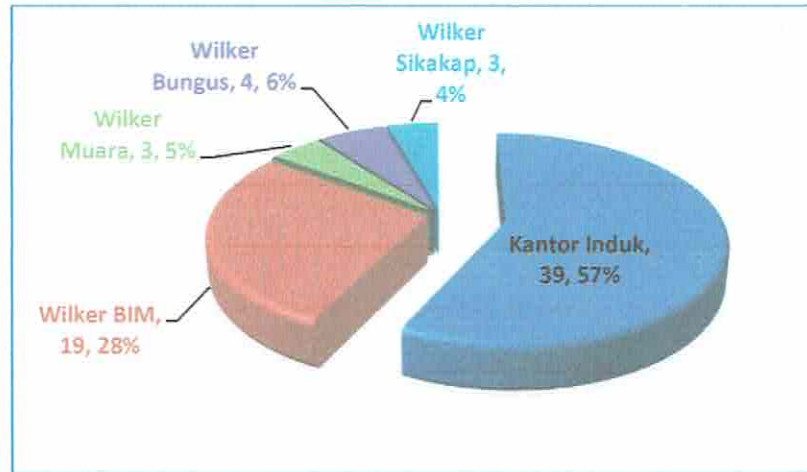
Grafik 1.3
Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang
Berdasarkan Seksi/ Subbag Tahun 2019



Dari grafik 1.3 dapat diketahui, bahwa pegawai KKP Kelas II Padang tahun 2019, paling banyak terdapat pada seksi Unit Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW), yaitu sebanyak 23 orang (34%) dan paling sedikit adalah pegawai Kasubag TU, yaitu sebanyak 12 orang (21%).

e. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas

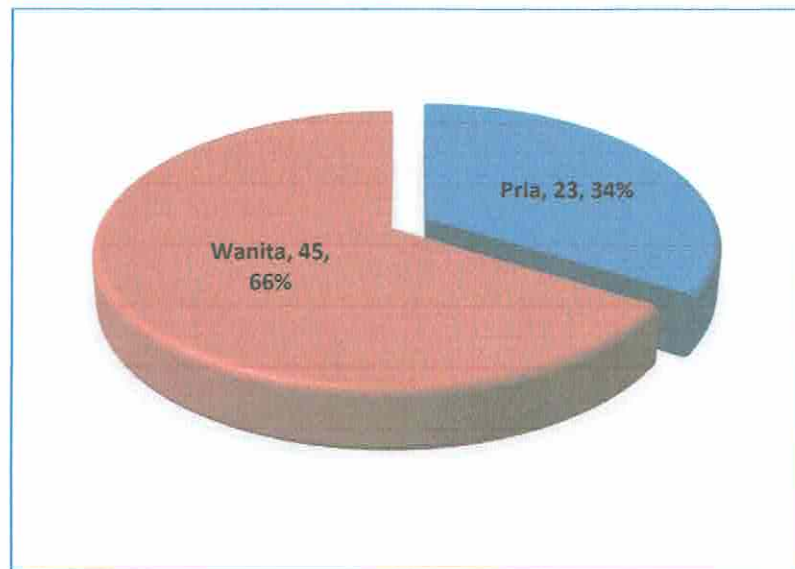
Grafik 1.4
Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang
Berdasarkan Tempat Tugas Tahun 2019



Dari grafik 1.4 dapat diketahui, bahwa pegawai KKP Kelas II Padang tahun 2019, lebih dari separuh bertugas di kantor induk, yaitu sebanyak 39 orang (57%), dan paling sedikit terdapat di wilker Muara Padang, yaitu sebanyak 3 orang (5%).

f. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 1.5
Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019



Dari grafik 1.5 dapat diketahui, bahwa pegawai KKP Kelas II Padang tahun 2019, jumlah pegawai pria dan wanita yaitu wanita 45 orang (66%) dan pria 23 orang (34%).

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai kinerjanya, KKP Kelas II Padang didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2019 anggaran KKP Kelas II Padang terdiri dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.117.323.000,- (Enam Belas Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terbagi menjadi 4 kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Distribusi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan
Di KKP Kelas II Padang Tahun 2018

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2,713.810.000,-
2.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	470.6000,000,-
3.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	196.604.000,-
4.	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12.736.309.000,-
	Jumlah	16.117.323,000,-

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Kinerja KKP Kelas II Padang terdiri dari :

1. KATA PENGANTAR
2. RINGKASAN EKSEKUTIF
3. BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Visi dan Misi
 - B. Latar Belakang
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Tugas Pokok dan Fungsi
 - E. Struktur Organisasi
 - F. Sumber Daya
 - G. Sistematika Penulisan
4. BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Aksi Kegiatan (RAK), Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja yang dilaksanakan oleh KKP Kelas II Padang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja KKP Kelas II Padang Tahun 2019, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan (dalam hal ini Kepala KKP Kelas II Padang) dan pemberi amanah atau atasan langsungnya (dalam hal ini Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja tahun 2019 di lingkungan KKP Kelas II Padang termuat dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 KKP Kelas II Padang.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, KKP Kelas II Padang telah menyusun RAK tahun 2015 – 2019, yang merupakan gambaran yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tersebut, termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, dan sasaran serta cara mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bidang pencegahan masuk

keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas serta pengendalian dampak risiko lingkungan.

1. Rencana Aksi Kegiatan

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) menyusun Rencana Aksi Program (RAP) P2P tahun 2015–2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019 kemudian menjadi acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun RAK dengan periode waktu yang sama yakni tahun 2015–2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, RAK KKP Kelas II Padang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen P2P dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

RAK KKP Kelas II Padang ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas II Padang dalam kurun waktu 2015-2019 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen P2P. Disamping uraian kegiatan, RAK ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator yang merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Uraian RAK KKP Kelas II Padang Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 – 2019
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kabupaten/ Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	5.317 sertifikat	4.991 sertifikat	5.216 sertifikat	5.185 sertifikat	5.200 sertifikat
			2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit	1.129 dokumen	1.094 dokumen	1.215 dokumen	1.180 dokumen	1.235 dokumen
			4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus				19 Layanan	19 Layanan
			5. Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah				1 Bandara	1 Pelabuhan
			6. Jumlah sertifikat/ surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	13.500 sertifikat	14.175 sertifikat	21.500 sertifikat	22.500 sertifikat	23.500 sertifikat
			7. Jumlah Pelabuhan/ bandara/ PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	-	-	-	5 pelabuhan/ bandara	5 pelabuhan/ bandara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	8. Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	-	-	-	5 pelabuhan/ bandara	5 pelabuhan/ bandara
3.		Menurunnya Penyakit Menular Langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	100 orang	300 orang	650 orang	650 orang	800 orang
4.		Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	48 dokumen
			11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM yang menunjang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-	-	-	15 Pelatihan	13 Pelatihan
			12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	-	-	-	6 unit	9 unit

2. Rencana Kinerja Tahunan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan yang merupakan proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukannya menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RAK juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja, seksi PKSE Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tahun 2019, telah disusun draft Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
KKP Kelas II Padang Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kabupaten/ kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	5.200 sertifikat
			2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%
			3. Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit	1.235 dokumen
			4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	19 lokasi
			5. Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 Pelabuhan
			6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	23.500 sertifikat
			7. Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	5 pelabuhan/ Bandara
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	8. Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	5 Pelabuhan/ Bandara
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Menurunnya Penyakit Menular Langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	800 orang

4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	48 dokumen
			11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM yang menunjang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	13 pelatihan
			12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	9 unit

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai atasan langsungnya untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Padang
Tahun 2019

NO	INDIKATOR	TARGET
1.	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	5.200 Sertifikat
2.	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%
3.	Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit	1.235 Dokumen
4.	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	19 Layanan
5.	Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 Pelabuhan
6.	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	23.500 Sertifikat
7.	Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	5 Pelabuhan/ Bandara
8.	Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	5 Pelabuhan/ Bandara
9.	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	800 Orang
10.	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	48 Dokumen
11.	Jumlah peningkatan kapasitas SDM yang menunjang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	13 Pelatihan
12.	Jumlah pengadaan sarana prasarana	9 Unit

Pada Perjanjian Kinerja KKP Pelabuhan Kelas II Padang di alokasikan anggaran sebesar Rp. 16.117.323.000,- (Enam Belas Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mengukur kinerja kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tahun 2019, terdapat beberapa sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan tahun 2019. Berikut adalah target dan capaian indikator kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tahun 2019.

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kegiatan
KKP Kelas II Padang Tahun 2019

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
1.	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	5.200 sertifikat	4.896 Sertifikat	94,15%
2.	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%	100%	100%
3.	Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit	1.235 Dokumen	1.559 dokumen	126,23%
4.	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	19 Layanan	19 Layanan	100%
5.	Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 Bandara/ Pelabuhan	1 Bandara/ Pelabuhan	100%
6.	Jumlah sertifikat/ surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	23.500 Sertifikat	21.507 Sertifikat	91,51%
7.	Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	5 Pelabuhan/ Bandara	5 Pelabuhan/ Bandara	100%
8.	Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	5 Pelabuhan/ Bandara	5 Pelabuhan/ Bandara	100%
9.	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	800 Orang	1.324 Orang	165,5%
10.	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	48 Dokumen	56 Dokumen	116,67%
11.	Jumlah peningkatan kapasitas SDM yang menunjang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	13 Pelatihan	32 Pelatihan	246,15%
12.	Jumlah pengadaan sarana prasarana	9 Unit	17 Unit	188,89%

Gambaran capaian kinerja KKP Kelas II Padang tahun 2019, dapat dilihat melalui beberapa indikator yang terkait sasaran strategis berikut ini :

1. INDIKATOR PERTAMA

Jumlah Alat Angkut sesuai dengan Standar Kekearantinaan Kesehatan

a. Penjelasan Indikator

Kegiatan pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekearantinaan kesehatan adalah merupakan kegiatan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan sertifikat Surat Izin Berlayar Kesehatan atau disebut juga dengan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) dan sertifikat sanitasi atau disebut juga dengan *Ship Sanitation Certificate Exemption Certificate* (SSCEC).

Surat Izin Berlayar Kesehatan/ PHQC diberikan kepada kapal yang akan berlayar, baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan dan hasil pengamatan langsung/ pemeriksaan sanitasinya. Sertifikat sanitasi kapal/ SSCEC diterbitkan bagi kapal yang sudah habis masa berlakunya (enam bulan) atau bagi kapal baru setelah dilakukan pemeriksaan kondisi sanitasinya.

b. Defenisi Operasional

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekearantinaan Kesehatan dengan hasil sertifikat PHQC dan SSCEC dalam kurun waktu satu tahun

c. Rumus/ cara perhitungan

Akumulasi jumlah hasil penerbitan sertifikat PHQC dan SSCEC dalam satu tahun.

Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan :

- N = Persentase cakupan jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekearantinaan Kesehatan dalam satu tahun
- X = Jumlah penerbitan sertifikat PHQC dan SSCEC dalam satu tahun
- Y = Target jumlah penerbitan sertifikat PHQC dan SSCEC dalam satu tahun

d. Capaian Indikator

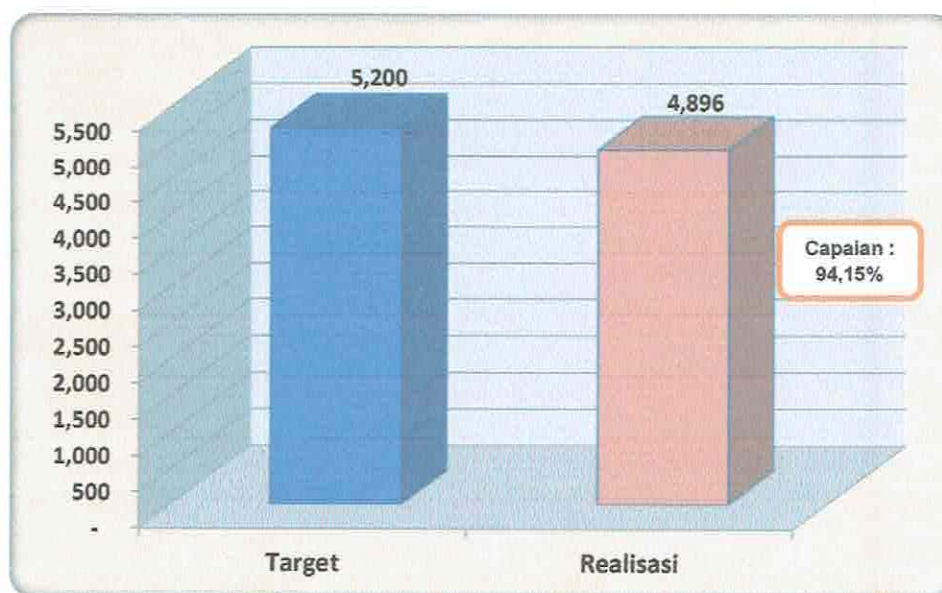
1) Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan

Capaian indikator kinerja kegiatan jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan tahun 2019 adalah sebesar 94,15% atau jumlah penerbitan sertifikat PHQC dan SSCEC sebanyak 4.896 sertifikat dari target sebanyak 5.200 sertifikat.

$$\frac{4.896}{5.200} \times 100\% = 94,15\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut :

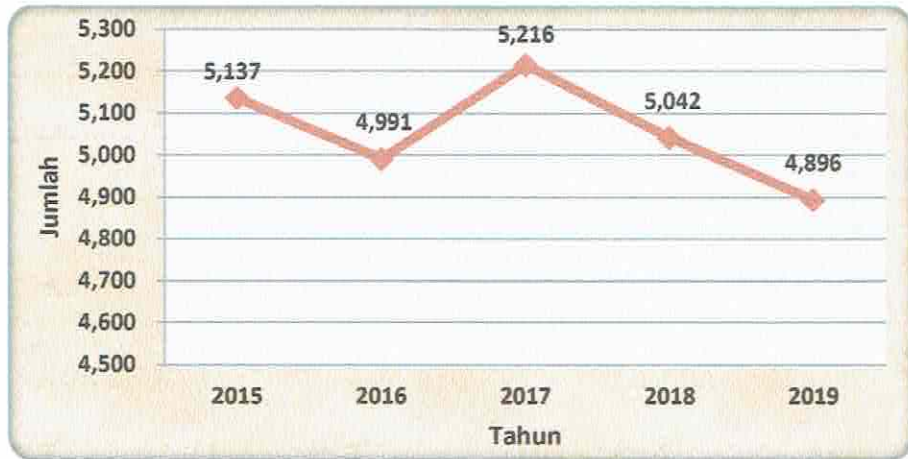
Grafik 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan
Standar Keekarantinaan Kesehatan Tahun 2019



Sumber : Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019

Dari grafik 3.1 dapat diketahui, bahwa capaian kinerja indikator Jumlah Alat Angkut sesuai dengan Standar Keekarantinaan Kesehatan di KKP Kelas II Padang tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan, dimana terdapat kekurangan sebesar 5,88% (306 sertifikat).

Grafik 3.2
Trend Jumlah Alat Angkut
Sesuai dengan Standar Kekearantinaan Kesehatan
Tahun 2015–2019 di KKP Kelas II Padang

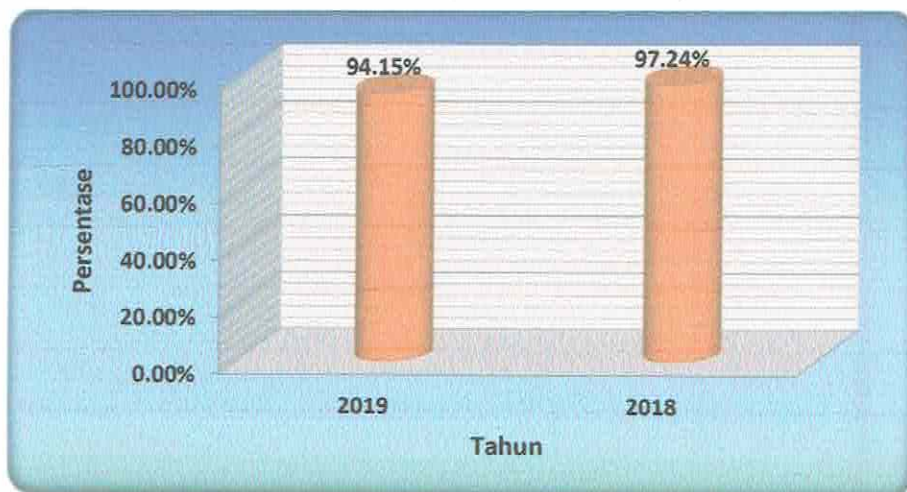


Sumber : Laporan Kedatangan Kapal KKP Kelas II Padang

Dari grafik 3.2 dapat diketahui, bahwa trend jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekearantinaan kesehatan di KKP Kelas II Padang dari tahun 2015 s.d 2019 setiap tahunnya terjadi fluktuasi, paling banyak terdapat tahun 2017 (5.216 sertifikat) dan paling sedikit terdapat pada tahun 2019 (4.896 sertifikat). Dari tahun 2017 sampai 2019 setiap tahunnya selalu terjadi penurunan.

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan 2018

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Alat Angkut
Sesuai dengan Standar Kekearantinaan Kesehatan
Di KKP Kelas II Padang Tahun 2019 dengan 2018



Sumber : Laporan Tahunan KKP Kelas II Padang

Dari grafik 3.3 dapat diketahui, bahwa capaian kinerja indikator jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekearantinaan kesehatan di KKP Kelas II Padang

Tahun 2019 sebesar 94,15%, jika dibandingkan dengan tahun 2018 (97,24%) terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 3,09%.

3) Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Indikator

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan tahun 2019, telah dilakukan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan sertifikat PHQC dan penerbitan sertifikat sanitasi/ SSCEC sesuai dengan standar operasional prosedur. Jumlah pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan PHQC sebanyak 4.616 sertifikat dan jumlah pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan SSCEC sebanyak 280 sertifikat.

4) Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan tahun 2019 belum memenuhi target yang direncanakan, hanya sebesar 94,15%. Dalam pencapaian target pada indikator ini tidak dapat diintervensi secara internal/ hanya bersifat pasif karena sangat dipengaruhi dengan frekuensi kedatangan kapal di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Jumlah kedatangan/ keberangkatan kapal tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 111 unit (2,35%). Hal ini disebabkan karena tidak ada lagi ekspor batu bara, biji besi dan Semen Padang.

5) Kendala/ Masalah yang dihadapi

Kendala/ masalah yang dihadapi dalam pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan adalah masih rendahnya kapasitas SDM petugas yang mampu berbahasa Inggris secara aktif dan sarana dalam melakukan pemeriksaan kapal belum memadai, dimana motor boat yang digunakan petugas untuk pemeriksaan kapal tidak layak untuk membawa petugas, karena kapal yang dipakai adalah kapal kayu yang biasa digunakan untuk memancing dan mengangkut barang untuk suplay kebutuhan di kapal.

6) Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas dalam pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan, maka saat melakukan pemeriksaan kapal dengan crew asing masih diperlukan pendampingan oleh agen pelayaran untuk berkomunikasi. Sedangkan untuk penggunaan motor boat dalam rangka pemeriksaan, petugas harus memperhatikan kondisi cuaca, seperti gelombang besar ataupun hujan, maka pemeriksaan kapal belum dilakukan.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2019 capaian kinerja pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 94,15%. Pagu anggaran dalam mendukung pelaksanaan di kantor ini sebesar Rp. 478.136.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 465.598.429,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah), sehingga cakupan realisasi anggaran sebesar 97,38%. Pada indikator ini realisasi anggaran lebih besar dibandingkan realisasi capaian indikator kinerja. Hal ini disebabkan bahwa volume target pada indikator kinerja tidak sama atau tidak sejalan dengan target volume anggaran, dimana target volume pada indikator kinerja lebih besar dibandingkan target volume pada anggaran. Disamping itu target pada indikator kinerja tidak semuanya yang dianggarkan.

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP

a. Defenisi Operasional

Defenisi operasional indikator ini adalah jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun.

b. Rumus/ cara perhitungan

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah sinyal SKD KLB dikali 100%

Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

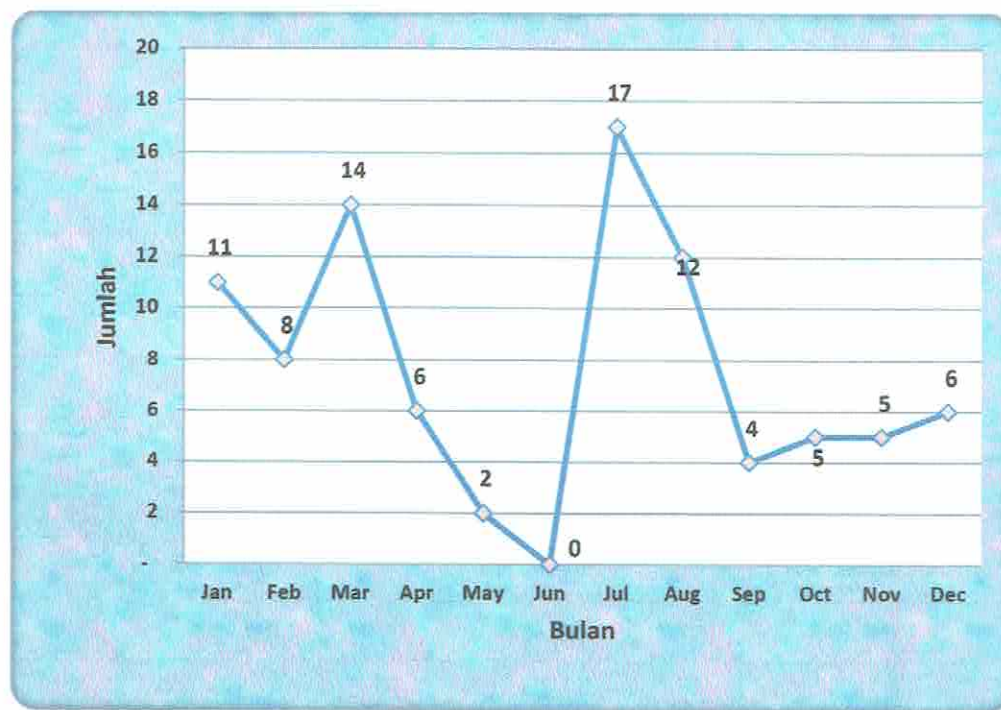
$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan :

- N = Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP
- X = Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/ bandara yang direspon kurang dari 24 jam
- Y = jumlah sinyal SKD KLB

kemudian bulan Maret sebanyak 14 kali. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut.

Grafik 3.5
Trend Pelaksanaan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD),
KLB dan Bencana Di Wilayah Layanan KKP Tahun 2019
Di KKP Kelas II Padang



2) Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Indikator

Dalam rangka pelaksanaan indikator Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP tahun 2019, telah dilakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor yang terdapat di wilayah layanan KKP Kelas II Padang, seperti dengan dinas kesehatan, KSOP, Otoritas Bandara, Bea dan Cukai, Imigrasi dan lainnya.

Pelaksanaan indikator pada tahun 2019 hanya dilakukan terhadap pengawasan kedatangan penumpang yang datang dari luar negeri terjangkit penyakit MERS-CoV dan *Meningitis Meningokokus*, karena tidak ada laporan adanya KLB ataupun kemungkinan terjadinya KLB di perimeter area dan buffer area.

3) Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP tahun 2019 sesuai dengan target yang direncanakan. Setiap adanya kedatangan pesawat yang datang dari luar negeri yang merupakan negara terjangkit penyakit menular potensial wabah, selalu

dilakukan pengawasan yang ketat dengan berkoordinasi dengan otoritas bandara, air lines, Bea Cukai dan Imigrasi. Jumlah kedatangan pesawat dari luar negeri dari negara terjangkit pada tahun 2019 sebanyak 90 unit, yaitu dari Arab Saudi yang membawa jemaah umroh dan haji.

4) Kendala/ Masalah yang dihadapi

Kendala/ masalah yang dihadapi dalam Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP adalah masih kurangnya sarana dalam tindakan penyehatan orang dan barang, seperti belum adanya *body cleaning* di Bandara Internasional Minangkabau.

5) Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan kegiatan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP, perlu pengadaan *body cleaning* di Bandara Internasional Minangkabau, serta terus meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP sebesar 100%. Pagu anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebanyak Rp. 238.260.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebanyak Rp. 233.668.400,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga cakupan realisasi anggaran sebesar 98,07%. Pada indikator ini terdapat efisiensi kegiatan sebesar 1,93%.

3. INDIKATOR KETIGA

Jumlah Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit

a. Penjelasan Indikator

Pelaksanaan indikator Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit adalah merupakan kegiatan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan certificate of pratique (COP), pengawasan *General Declaration* (Gendec) terhadap pesawat dan laporan pengamatan penyakit di klinik layanan lainnya yang dilakukan selama satu tahun.

Sertifikat COP merupakan sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada setiap kapal yang datang dari luar negeri dan dari daerah terjangkit penyakit

potensial wabah yang masuk wilayah KKP Kelas II Padang. Sertifikat COP diberikan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kesehatan kapal, orang (crew dan penumpang), kondisi sanitasi kapal dan ketersediaan obat-obatan di kapal, kemudian kapal dinyatakan sehat.

Sertifikat Gendec merupakan kegiatan pengawasan terhadap setiap kedatangan pesawat, orang dan barang dari luar negeri, jika kedatangan pesawat dari luar negeri terjangkau, maka pesawat harus parkir di tempat khusus/ isolated area untuk menghindari kontak dengan penumpang lainnya dan terhadap pesawat dan penumpang akan dilakukan pemeriksaan dan tindakan khusus.

Kegiatan di klinik layanan lainnya merupakan kegiatan pengamatan kejadian penyakit dan faktor risiko di wilayah KKP Kelas II Padang. Pengamatan dilakukan di setiap fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya, yang ada di wilayah perimeter area maupun buffer area masing-masing wilayah kerja KKP Kelas II Padang.

b. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari indikator jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan/ bandara dengan hasil *Certificate of Pratique, General Decleration* dan di klinik layanan lainnya seperti pelaksanaan surveilans rutin.

c. Rumus/ cara perhitungan

Akumulasi jumlah penerbitan sertifikat COP, Gendec dan laporan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun

Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan :

- N = Persentase capaian hasil jumlah Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit dalam 1 tahun
- X = Jumlah Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit dalam 1 tahun
- Y = Target Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit dalam 1 tahun

d. Capaian Indikator

1) Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan

Capaian indikator kinerja Jumlah Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit tahun 2019 adalah sebesar 126,23% atau jumlah penerbitan sertifikat COP, Gendec dan laporan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya tahun 2019 sebanyak 1.559 dokumen dari target

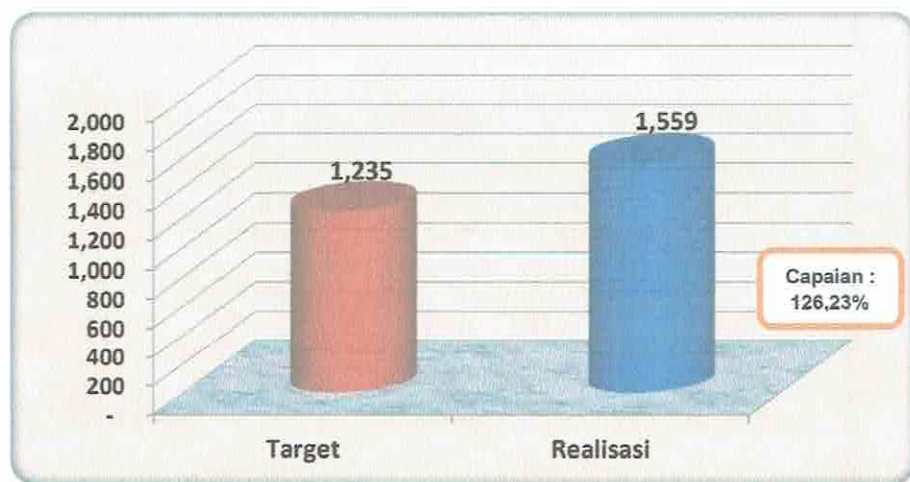
sebanyak 1.235 dokumen. Tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena pada tahun 2019 terjadinya peningkatan kedatangan pesawat dari luar negeri dan adanya penerbangan langsung membawa jemaah umroh.

Hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1.559}{1.235} \times 100\% = 126,23\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut :

Grafik 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Jumlah Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal
Masuk dan Keluarnya Penyakit Tahun 2019



Dari grafik 3.6 dapat diketahui, bahwa realisasi indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di KKP Kelas II Padang Tahun 2019 sebanyak 1.559 dokumen. Jika dibandingkan dengan target (1.235 dokumen), capaian kinerja indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 26,23% (324 dokumen).

Trend jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di KKP Kelas II Padang dari tahun 2015-2019 setiap tahunnya terjadi fluktuasi. Peningkatan yang signifikan terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018, yaitu sebanyak 356 dokumen (29,30%), kemudian tahun 2019 terjadi penurunan kembali sebanyak 12 dokumen (0,76%) dan paling sedikit terdapat pada tahun 2016 (1.094 dokumen).

Grafik 3.7
Trend Jumlah Deteksi Dini dalam rangka Cegah Tangkal
Masuk dan Keluarnya Penyakit Tahun 2015 - 2019
Di KKP Kelas II Padang



2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan 2018

Grafik 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Deteksi Dini
Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit
Di KKP Kelas II Padang Tahun 2019 dengan 2018



Dari grafik 3.8 dapat diketahui, bahwa capaian kinerja pada Indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di KKP KKP Kelas II Padang Tahun 2019 sebesar 126,23%, jika dibandingkan dengan tahun 2018 (133,14%) terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 6,91%.

3) Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Indikator

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di KKP tahun 2019, telah dilakukan pemeriksaan pada setiap kapal yang datang dari luar negeri dan

diberikan sertifikat COP, kemudian melakukan pengawasan kedatangan pada setiap kedatangan pesawat dari luar negeri dan meminta dokumen general declaration (Gendec), serta melakukan surveilans rutin setiap bulannya di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di masing-masing wilayah kerja.

4) Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di KKP tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 123,23%. Jumlah penerbitan COP sebanyak 322 dokumen, Gendec sebanyak 1.175 dokumen dan kegiatan surveilans rutin sebanyak 62 dokumen. Pencapaian indikator kinerja jauh melebihi target yang ditetapkan, disebabkan karena adanya penambahan 1 (satu) flight setiap harinya dari Malaysia – BIM PP. Disamping itu ada penerbangan langsung Padang ke Arab Saudi pulang pergi yang membawa jamaah umrah. Dalam pelaksanaan indikator ini, sangat dipengaruhi dengan adanya koordinasi yang baik dengan lintas program dan lintas sektor yang terdapat di wilayah kerja KKP Kelas II Padang.

5) Kendala/ Masalah yang dihadapi

Kendala/ masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini adalah SDM yang belum mampu berbahasa inggris dengan baik, sehingga sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan crew kapal maupun pesawat. Disamping itu, waktu yang tersedia dalam pemeriksaan pesawat sangat sedikit, serta dalam pelaksanaan surveilans rutin, data yang tersedia di fasilitas pelayanan dan instansi lainnya belum terdokumentasi dengan baik dan tergantung dengan individu/ orang tertentu, sehingga pada saat data dibutuhkan, sementara orang yang melakukan pencatatan data tersebut tidak ditempat, maka harus datang pada hari berikutnya.

6) Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas dalam pelaksanaan deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit perlu meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada lintas program dan lintas sektor yang terdapat di wilayah kerja dan meningkatkan kapasitas SDM dalam berbahasa inggris, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2019 capaian kinerja fisik jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit sebesar 126,23%. Pagu anggaran untuk mendukung indikator ini sebanyak Rp. 290.586.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebanyak Rp. 272.103.300,- (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga cakupan realisasi anggaran sebesar 93,64%. Pada indikator ini terdapat efisiensi sebesar 32,69%.

4. INDIKATOR KEEMPAT

Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus

a. Penjelasan Indikator

Pelayanan kesehatan pada situasi khusus dilaksanakan pada situasi khusus arus mudik lebaran, situasi khusus natal dan tahun baru dan situasi khusus pada embarkasi haji dan debarkasi haji.

Pelayanan kesehatan situasi khusus pada arus mudik lebaran dilaksanakan dilaksanakan mulai 14 hari sebelum lebaran sampai dengan 14 hari pasca lebaran. Pelayanan kesehatan situasi khusus ini dilaksanakan di lima layanan yaitu Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Sikakap, dan Bandara Internasional Minangkabau.

Pelayanan kesehatan situasi khusus natal dan tahun baru juga dilaksanakan di lima layanan dan pelaksanaannya dimulai 7 hari sebelum natal sampai dengan 7 hari sesudah tahun baru. Dan untuk pelayanan kesehatan embarkasi haji dan debarkasi haji dilaksanakan di dua layanan yaitu asrama haji dan terminal.

b. Definisi Operasional

Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus seperti pelayanan kesehatan di Embarkasi dan Debarkasi Haji, pelayanan kesehatan pada saat arus mudik Lebaran, Natal, Tahun Baru dan lain-lain.

c. Rumus/ Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah layanan (posko) yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun. Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan :

X = Jumlah layanan (posko) yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun

Y = Target jumlah layanan (posko) yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun

N = Persentase capaian hasil jumlah layanan (posko) yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun

A. Capaian Indikator

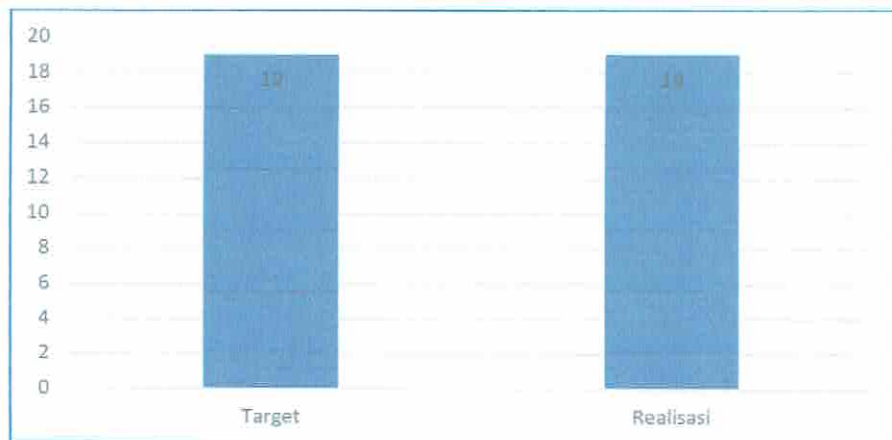
1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2019

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus adalah sebanyak 19 kegiatan. Yaitu di kegiatan pelayanan kesehatan di Embarkasi dan Debarkasi Haji baik itu di Asrama Haji dan Terminal (Bandara), Pelayanan kesehatan pada arus mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan di semua wilayah kerja KKP Kelas II Padang.

$$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

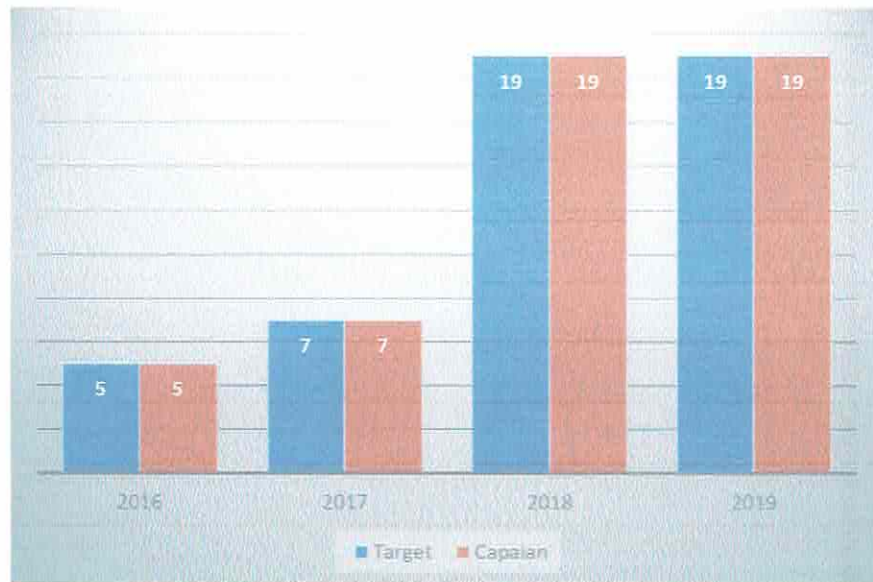
Pelayanan kesehatan pada situasi khusus pada tahun 2019 ini tercapai 100%, hal ini dapat terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 3.9
Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus



2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2018, 2017 dan 2016

Grafik 3.10
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Jumlah pelayanan kesehatan pada Situasi Khusus di KKP Kelas II Padang



Dari grafik terlihat bahwa jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus seperti kegiatan pelayanan kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji, pelayanan kesehatan pada arus mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru pada tahun 2019 meliputi 19 kegiatan dan ini sesuai dengan target. Begitu pula dengan tahun 2018, 2017 dan 2016 pelayanan kesehatan pada situasi khusus tercapai 100%.

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

Kebijakan dan upaya yang dilaksanakan adalah diberikan pelatihan kemampuan teknis bagi petugas untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus. Selain itu kemampuan SDM masih terbatas.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan tersebut sebesar Rp.870.100.000,-(delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah). Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.869.255.520,-

(delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima lima ribu rupiah lima ratus dua puluh rupiah) atau 98 %.

5. INDIKATOR KELIMA :

Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah

a. Penjelasan Indikator

Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah adalah merupakan kegiatan penyusunan suatu kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di pelabuhan/ bandara.

Penyusunan rencana kontinjensi ini dimaksudkan sebagai bentuk kesiapsiagaan Negara Indonesia dalam menghadapi kemungkinan masuk penyakit melalui pelabuhan/ bandara.

Kedaruratan Kesehatan masyarakat (KKM) dapat terjadi kapan saja sehingga kita tidak bisa memprediksi waktu kejadian masalah kesehatan tersebut, sehingga kita, baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dalam mencegah (*to prevent*), mendeteksi dini (*to detect*), menangani kasus sedini mungkin (*to response*). Ketepatan dan kecepatan dalam merespon suatu kejadian masalah kesehatan akan mempengaruhi sejauh mana besaran kejadian KKM tersebut.

b. Defenisi Operasional

Defenisi operasional indikator ini adalah jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. Di KKP Kelas II Padang tahun 2019 penusunan renkon dilakukan diwilayah kerja pelabuhan Bungus.

c. Rumus/ Cara Perhitungan

Jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah yang disusun atau dibuat adalah satu di wilayah KKP Kelas II Padang

Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan :

- N = Persentase jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen renkon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah dalam 1 tahun
- X = Jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen renkon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah dalam 1 tahun
- Y = Target pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen renkon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah dalam 1 tahun

d. Capaian Indikator

1) Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan

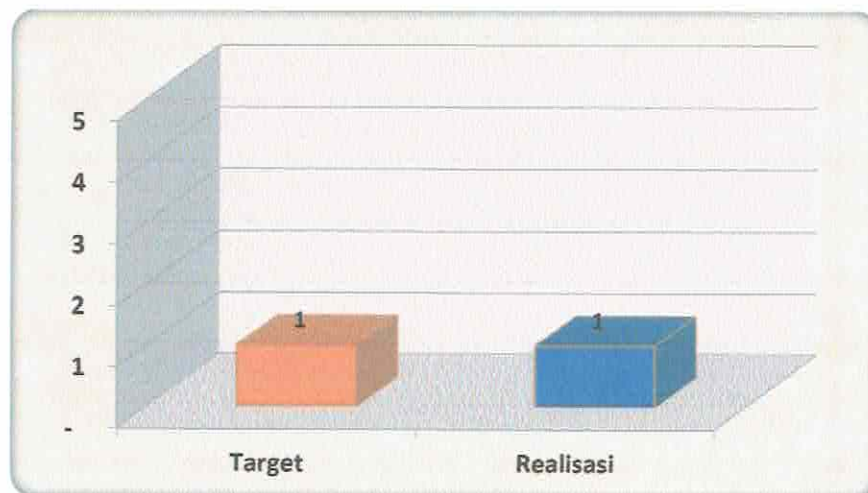
Capaian indikator kinerja jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen renkon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah dalam 1 tahun di KKP Kelas II Padang tahun 2019 adalah sebesar 100%, karena realisasi indikator ini sesuai dengan yang direncanakan.

$$N = X/Y \times 100\%$$

$$N = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 3.9 berikut :

Grafik 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi
Pelabuhan/ Bandara yang memiliki Dokumen Renkon
Di KKP Kelas II Padang Tahun 2019



Dari grafik 3.11 dapat diketahui, bahwa realisasi capaian kinerja indikator Jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah terlaksana sesuai rencana (100%).

2) Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Indikator

Dalam rangka pelaksanaan indikator jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen rencon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah , telah dilakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor yang terdapat di wilayah layanan KKP Kelas II Padang, terutama di wilayah kerja pelabuhan Bungus seperti dengan dinas kesehatan, KSOP, Bea dan Cukai, Imigrasi dan lainnya.

3) Analisis Capaian Indikator

Capaian indikator jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen rencon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah di Wilayah Layanan KKP tahun 2019 sesuai dengan target yang direncanakan.

4) Kendala/ Masalah yang dihadapi

Dalam pencapaian jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen rencon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah adalah masih kurangnya pemahaman peserta dalam penyusunan rencon, disamping itu setiap pertemuan penyusunan rencon pada umumnya peserta yang dikirim instansi bukan pengambil kebijakan dan peserta pada pertemuan lanjutan berbeda dengan sebelumnya, sehingga harus memberikan sosialisasi ulang.

5) Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan kegiatan jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen rencon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah maka disarankan kepada lintas sector terkait agar peserta yang menghadiri pertemuan adalah sama dan pengambil kebijakan.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja jumlah pelabuhan/ bandar udara/ PLBD yang memiliki dokumen rencon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah sebesar 100%. Pagu anggaran untuk mendukung indikator ini sebanyak Rp. 114.191.000,- (serratus embpat belas juta serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebanyak Rp. 113.505.500 (serratus tiga belas juta lima ratus lima

ribu rupiah), sehingga cakupan realisasi anggaran sebesar 99,40%, terdapat efisiensi sebesar 0,60%.

6. INDIKATOR KEENAM

Jumlah Sertifikat/ Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang Diterbitkan

a. Penjelasan Indikator

Sertifikat/ surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan berupa surat laik terbang, surat izin angkut orang sakit, surat izin angkut jenazah dan penerbitan ICV (*International Certificate of Vaccination*). Surat laik terbang diberikan bagi ibu hamil, bayi, dan lanjut usia yang akan melakukan perjalanan udara setelah dilakukan pemeriksaan. Surat izin angkut orang sakit diberikan untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan yang dalam keadaan sakit. ICV diberikan bagi setiap orang setelah dilakukan vaksinasi internasional untuk jenis vaksin meningitis atau yellow fever.

b. Definisi Operasional

Jumlah sertifikat/ surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan berdasarkan permintaan/ permohonan yang diterima dalam periode satu tahun.

c. Rumus / Cara perhitungan

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan :

- X = Jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun
- Y = Target jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun
- N = Persentase capaian hasil jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun

A. Capaian Indikator

1. Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan

Jumlah sertifikat izin angkut laik terbang yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 21.507 dokumen. Sertifikat tersebut meliputi sertifikat izin angkut laik terbang yaitu sebanyak 1.416 dokumen, sertifikat izin angkut orang sakit sebanyak 672 dokumen, sertifikat izin angkut jenazah sebanyak 38 dokumen dan sertifikat vaksinasi internasional (ICV) sebanyak 19.491 buku.

Dengan persentase perbandingan antara target dan capaian tersebut di bawah dengan perhitungan rumus :

$$\frac{21507}{23500} \times 100\% = 91,51\%$$

Grafik 3.12
Target dan Relisasi Penerbitan Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan
Lintas Wilayah tahun 2019



Dari grafik diatas terlihat bahwa realisasi sertifikat/ surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 21.507 dokumen atau sebesar 91,51%.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2017 dan 2016

Grafik 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi Penerbitan Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015



Dari grafik dapat diketahui, bahwa capaian kegiatan pada penerbitan sertifikat/surat ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah di KKP Kelas II Padang Tahun 2019 adalah sebesar 91,51 %.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

- Penerbitan sertifikat/ surat izin layanan kesehatan lintas wilayah pada tahun 2019 meliputi penerbitan sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah dan penerbitan sertifikat vaksinasi Internasional (ICV).
- Terjadinya penurunan penerbitan sertifikat ini lebih signifikan pada penerbitan sertifikat ICV. Hal ini diakibatkan sejak akhir oktober 2019 telah ada dua klinik swasta yang melayani penerbitan ICV selain Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang.

3. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran yang tersedia untuk penerbitan sertifikat/ surat izin layanan kesehatan lintas wilayah ini.

7. INDIKATOR KETUJUH

Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang Memenuhi Syarat - Syarat Sanitasi

a. Penjelasan Indikator

Pelabuhan/ bandara/ PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan adalah Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang telah melaksanakan kegiatan pengawasan, dan rekomendasi tindakan yang menjadikan terpenuhinya syarat-syarat sanitasi di Pelabuhan/Bandara/PLBD, pelabuhan/bandara yang sepanjang tahun 2018 menurut penilaian dan pelaporan baik, maka dinyatakan layak dan memenuhi syarat.

b. Defenisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.

c. Rumus/ cara perhitungan

Akumulasi jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai TPM memenuhi syarat layak/ laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.

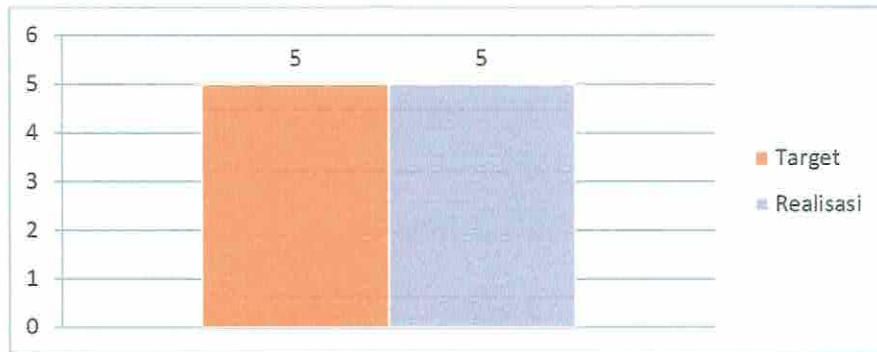
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan

Capaian indikator kinerja kegiatan Pelabuhan/Bandara yang Memenuhi Syarat-syarat Sanitasi yang telah memiliki sanitasi yang baik, dari target 5 pelabuhan/bandara semua tercapai sebanyak 5 pelabuhan/ bandara/ PLBD yang memiliki syarat-syarat sanitasi baik.

Target dan realisasi capaian indikator tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 3.14 berikut ini :

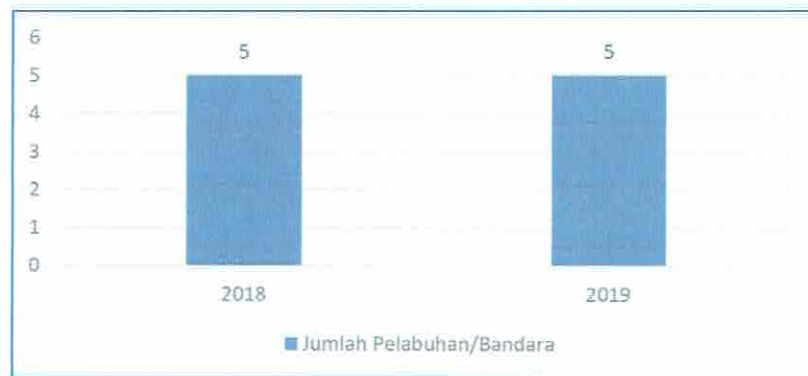
Grafik. 3.14
Target dan Realisasi Pelabuhan/ Bandara/ PLBD
yang Memenuhi Syarat-syarat Sanitasi Tahun 2019



Dari Grafik 3.14 dapat dilihat dari target 5 pelabuhan/bandara yang menjadi target, tercapai sebanyak 5 pelabuhan/bandara/PLBD memenuhi syarat - syarat sanitasi tahun 2019.

2) Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

Grafik. 3.15
Perbandingan Realisasi Pelabuhan/ Bandara/ PLBD
yang Memenuhi Syarat-syarat Sanitasi
Tahun 2018 dan 2019



Dari grafik 3.15 dapat diketahui, bahwa realisasi indikator Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang Memenuhi Syarat-syarat Sanitasi di KKP Kelas II Padang Tahun 2018 dan 2019 adalah sebanyak 5 Pelabuhan/Bandara (100%).

3) Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh :

- a) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungannya berupa penyuluhan tentang kesehatan lingkungan di Wilayah Kerja Pelabuhan dan atau Bandara.
- b) Konsultasi teknis ke Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan serta Dirjen Kesmas.
- c) Koordinasi intensif lintas sektor di lingkungan pelabuhan, Dinkes Provinsi, dan Dinas Kesehatan Propinsi/Kota/Kabupaten.
- d) Melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan sanitasi di wilayah kerja.
- e) Peningkatan SDM pelaksanaan program sanitasi di wilayah kerja.
- f) Pengadaan alat dan bahan operasional penunjang tupoksi Pengendalian Risiko Lingkungan

e. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan Pelabuhan/ Bandara/ PLBD Memenuhi Syarat-syarat Sanitasi sebesar 100%, sedangkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.363.166.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Dengan realisasi sebesar 92.41% atau sebesar Rp.335.601.700,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus rupiah). Pada indikator ini terdapat efisiensi sebesar 7.59%.

8. INDIKATOR KEDELAPAN

Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD Bebas Vektor pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area

a. Penjelasan Indikator

Kegiatan pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area adalah merupakan kegiatan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP di Pelabuhan/Bandara KKP Kelas II Padang.

b. Defenisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1 , tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 .

c. Rumus/ cara perhitungan

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer <1 , tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat <6 dalam satu tahun.

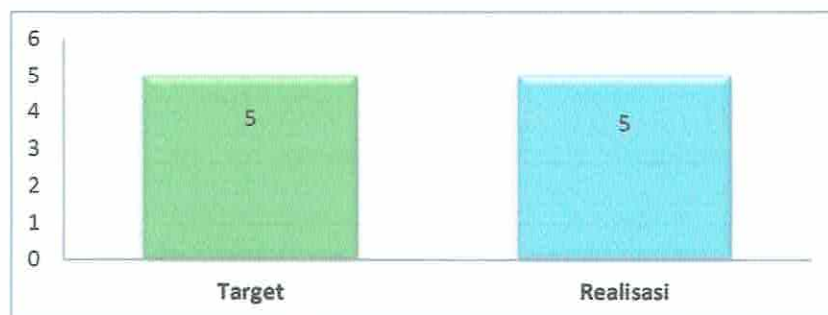
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan

Capaian indikator kinerja kegiatan Pelabuhan/ Bandara bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dari target 5 pelabuhan/ bandara/ PLBD semua tercapai dengan 5 pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.

Target dan realisasi capaian indikator tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 3.15 berikut :

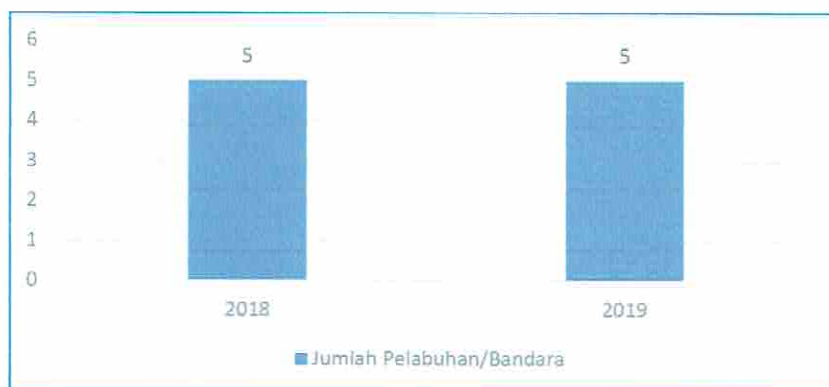
Grafik. 3.16
Target dan Realisasi Pelabuhan/ Bandara/ PLBD Bebas Vektor
Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area
Tahun 2019



Dari Grafik 3.15 dapat dilihat dari target 5 pelabuhan/bandara yang menjadi target, tercapai sebanyak 5 pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah Perimeter dan Buffer Area tahun 2019.

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

Grafik. 3.17
Perbandingan Realisasi Pelabuhan/ Bandara/ PLBD Bebas Vektor
Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area
Tahun 2018 dan 2019



Dari grafik 3.17 dapat diketahui, bahwa realisasi indikator Pelabuhan/ Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area di KKP Kelas II Padang Tahun 2018 dan 2019 adalah sebanyak 5 Pelabuhan/Bandara (100%).

3) Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Capaian indikator kinerja tercapai sesuai target yaitu 5 Pelabuhan/Bandara/PLBD yang hal ini dipengaruhi oleh :

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungannya berupa kader kesehatan lingkungan jumantik di Wilayah Kerja Pelabuhan dan atau Bandara.
- Penyuluhan kepada kader di Pelabuhan/Bandara/PLBD sebagai sharing informasi dan teknis kegiatan di wilayah pemantauan
- Konsultasi teknis ke Direktorat P2PTVZ
- Koordinasi intensif lintas sektor di lingkungan pelabuhan, P2P Provinsi, dan Dinas Kesehatan Propinsi/Kota/Kabupaten.
- Melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan survey vektor dan binatang pengganggu di wilayah kerja.
- Peningkatan SDM pelaksanaan program pengendalian vector di wilayah kerja.
- Pengadaan alat dan bahan operasional penunjang tupoksi Pengendalian Risiko Lingkungan.

e. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor pada wilayah perimeter dan buffer area sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.470.600.000,-(empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah). Dengan realisasi sebesar 96.33% atau sebesar Rp.453.328.980,-(empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Pada indikator ini terdapat efisiensi sebesar 3.67%.

9. INDIKATOR KESEMBILAN

Jumlah Orang yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung

a. Definisi Operasional

Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular langsung meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya.

b. Rumus / Cara Perhitungan

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan :

X = Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun

Y = Target jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun

N = Persentase capaian hasil jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun

A. Capaian Indikator

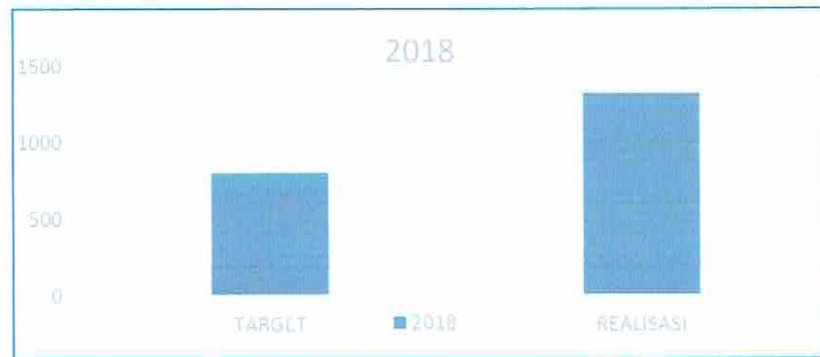
1. Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan

Pada tahun 2019 jumlah orang yang dilakukan deteksi dini penyakit menular adalah sebanyak 1324 orang, dengan persentase perbandingan tersebut di bawah

$$\frac{1324}{800} \times 100\% = 165\%$$

Grafik 3.18

Perbandingan capaian target orang yang dilakukan deteksi dini penyakit menular di KKP Kelas II Padang



Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah orang yang dilakukan deteksi dini HIV dan IMS pada tahun 2019 adalah sebanyak 1324 orang. Dan ini melebihi dari target (800 orang) yaitu sebesar 165,5 %, dan melebihi pencapaian di tahun 2018

Grafik 3.19

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Jumlah Orang yang Dilakukan Deteksi Dini Penyakit Menular di KKP Kelas II Padang Tahun 2015 sd 2019



Dari grafik di atas terlihat, pencapaian realisasi pada tahun 2019 jumlah orang yang dilakukan deteksi dini HIV dan IMS adalah sebanyak 1324 orang, dan ini melebihi dari target yaitu sebesar 165,5%.

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan

- Tersedianya sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan kegiatan mobile VCT baik dari segi kuantitas dan kualitas karena telah mendapatkan pelatihan mengenai mobile VCT
- Koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program terkait
- Waktu untuk pelaksanaan kegiatan mobile VCT dilaksanakan setiap 3x seminggu

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan tersebut sebesar Rp.196.604.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah). Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.188.424.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau 95,8%.

10. INDIKATOR KESEPULUH

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya

a. Definisi Operasional

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 Jenis Dokumen, antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian, e-monev DJA, e-monev Bappenas, LEB dalam periode satu tahun.

b. Rumus/Cara Perhitungan

$$\text{Capaian dokumen yang dihasilkan} = \frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen yang ditargetkan}} \times 100\%$$

$$116,67 \% = 56 / 48 \times 100\%$$

c. Capaian Indikator

1) Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa semua dokumen /laporan yang disusun tercapai 116,67%

Grafik 3.19
Capaian Target dan Realisasi Dokumen Dukungan Manajemen Tahun 2019



Dari grafik 3.18 terlihat bahwa seluruh syarat jenis dokumen dukungan manajemen dapat terealisasi (100%)

Grafik 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Dokumen Dukungan Manajemen Tahun 2015 s/d 2019



2) Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator

a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan laporan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi yang disusun tercapai 100% dari target sebesar 1 laporan(100%). Tingkat capaian indicator menunjukkan bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu organisasi.

Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan:

- Melakukan pengumpulan data dari masing-masing seksi/subbag tentang pencapaian program kegiatan.
- Melaksanakan penyusunan dengan menetapkan realisasi dan tingkat pencapaian program kegiatan dalam bentuk serta realisasi anggaran kegiatan.
- Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung laporan kinerja untuk persiapan evaluasi SAKIP dilingkungan Kementerian Kesehatan.

b) Dokumen Perencanaan dan Anggaran (RKAKL/ DIPA)

Capaian indicator kinerja tercapai sesuai target 100% yang hal ini dipengaruhi oleh:

- Dokumen perencanaan dan anggaran merupakan dokumen wajib yang diperlukan dalam organisasi
- Tersedianya anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai
- Optimalisasi SDM yang ada
- Melaksanakan penyusunan *E-Planning* serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018.
- Mengikuti pembahasan, penajaman, penelaahan usulan dokumen perencanaan dan anggaran.

c) Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kepegawaian

Laporan yang dihasilkan melalui seluruh kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian sejak mulai pengangkatan sebagai CPNS sampai dengan masa pensiun. Layanan Administrasi Kepegawaian adalah segala bentuk

pelayanan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi baik dalam hal pelayanan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai maupun fungsi operatif (teknis) yang meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pensiun pegawai yang disusun tercapai 100% dari target sebesar 2 laporan (100%).

Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan:

- Melaksanakan pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji berkala, pindah bekerja, pensiun, dan sebagainya.
- Melaksanakan sosialisasi tentang perkembangan proses layanan administrasi kepegawaian.
- Melaksanakan pengelolaan Sistem Manajemen dan Layanan Kepegawaian melalui **website: ropeg.kemkes.go.id**.
- Peningkatan kapasitas pegawai.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja dan semangat kerja serta mempererat dan sinergi dengan tim kerja.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai telah dilakukan kegiatan :

- Mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara baik pelatihan pengadaan barang jasa, pengelolaan arsip dan kepegawaian.
- Melaksanakan *transfer of knowledge* kepada pegawai atau pengelola yang tidak mengikuti langsung kegiatan pelatihan/pertemuan.

d) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Laporan Tahunan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen melalui penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan laporan perkembangan serta pencapaian hasil kegiatan yang diraih organisasi selama setahun.

Laporan pelaksanaan kegiatan merupakan laporan yang disusun sebagai hasil rangkuman seluruh kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan (laporan eksekutif bulanan). Laporan tahunan merupakan laporan yang berisi data dan informasi yang akurat yang mencakup hasil pencapaian kinerja organisasi yang merupakan hasil rangkuman seluruh kegiatan selama satu tahun. Kedua dokumen yang disusun tercapai 100% dari target sebesar 12 dokumen (100%). Dan 1 dokumen Laporan Tahunan (100%).

Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan:

- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap hari yang dirangkum dalam laporan bulanan.
- Membuat laporan tahunan sebagai rangkuman pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun.

e) Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan laporan melalui kegiatan pengelolaan keuangan Negara yang ada dilingkungan KKP Kelas II Padang dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau berita baik secara lisan maupun tertulis yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi yang disusun tercapai 100% dari target sebesar 2 laporan (100%).

Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan:

- Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan ke KPPN Padang dan Tim SAK wilayah.
- Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat Eselon I Ditjen P2P periode Semester I dan II.
- Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan periode Semester I dan II.

f) Penyusunan Laporan Target dan Pagu PNB

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan laporan melalui kegiatan pengelolaan dan penatausahaan PNB baik dalam penetapan target penerimaan maupun tata kelola dan administrasi PNB atau membuat target dan pagu PNB yang telah diatur dan disusun dalam waktu tertentu dengan analisis tertentu. Target dan Pagu PNB adalah sebuah sasaran akhir yang ingin dicapai dari sebuah objektive yang telah ada menggunakan formula volume x tarif perjenis PNB sesuai dengan Tarif PNB yang ditetapkan oleh menteri Keuangan dan batas maksimum penggunaan anggaran PNB yang bisa digunakan yang disusun tercapai 100% dari target sebesar 1 laporan (100%) untuk proposal PNB.

Kegiatan Penyusunan Laporan Target dan Pagu PNBP merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu organisasi. Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan:

- Melakukan penyusunan target dan pagu PNBP dan diusulkan keDitjen P2P Kemenkes RI.
- Mengikuti pertemuan revidi pengusulan target dan pagu PNBP di lingkungan Ditjen P2P
- Mengikuti pertemuan konsultasi pengelolaan PNBP di lingkungan DitjenP2P
- Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan PNBP di seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Padang

g) Pengelolaan dan Penyusunan Laporan BMN

Kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh melalui pengadaan, pengiriman pusat maupun hibah dari instansi lain untuk menghasilkan informasi dalam penyusunan neraca dan laporan sesuai ketentuan berlaku. Laporan BMN adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau berita baik secara lisan maupun tertulis yang berisikan informasi seputar pengelolaan barang milik Negara dari sebuah organisasi yang disusun tercapai 100% dari target sebesar 2 laporan (100%).

Kegiatan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan BMN merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu organisasi. Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan:

- Melakukan inventarisasi barang milik Negarasecara rutin.
- Melakukan stock opname barang milik Negara dan persediaan secara berkala.
- Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan BMN ke KPNL Wilayah Padang periode semester I dan II.
- Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan BMN tingkat Eselon I Ditjen P2P periode Semester I dan II.
- Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan BMN tingkat Kementerian Kesehatan periode Semester I dan II.

Walaupun telah mencapai 100%, masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian, antara lain perlunya peningkatan tata administrasi dan inventarisasi barang milik Negara.

Adapun penyelesaian permasalahan yang telah dilakukan, antara lain

1. adanya peningkatan pengetahuan pengelolaan BMN bagi pengelola BMN Satker.
2. pembinaan langsung dari pengelola BMN kuasa barang ke Satker.

d. Realisasi Anggaran

Anggaran DIPA KKP Kelas II Padang untuk kegiatan Dukungan Manajemen Rp. 12.736.309.000,- (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp. 12.651.154.815,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh satu Juta Seratus Lima Puluh empat Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) atau sebesar 99,33.

Komponen capaian kinerja organisasi

1. Gaji dan tunjangan
2. Operasional perkantoran
 - a. Layanan kantor
 - b. Keperluan sehari-hari perkantoran
 - c. Pemeliharaan operasional perkantoran
3. Dokumen program dan anggaran
 - a. Penyusunan RAK
 - b. Penyusunan E-Planning
 - c. Penyusunan dokumen RKA-KL
 - d. Pembahasan, penajaman dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan anggaran
4. Dokumen evaluasi dan perkantoran
 - a. Penyusunan laporan pelaksanaan program
 - b. Penyusunan laporan E Monev penganggaran
 - c. Penyusunan laporan E Monev Bappenas
 - d. Penyusunan laporan tahunan satker
 - e. Penyusunan laporan indikator RAK
 - f. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
 - g. Evaluasi SAKIP
5. Dokumen organisasi dan tata laksana
 - a. Penguatan dan peningkatan management mutu pelayanan
 - b. Persiapan satker dalam mencapai indikator WBK
6. Dokumen penyusunan PNBK

7. Dokumen perbendaharaan
 - a. Penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan
 - b. Konsolidasi pelaksanaan anggaran
 - c. Penatausahaan dan pengelolaan PNBP
8. Dokumen verifikasi dan akuntansi
 - a. Penyusunan laporan keuangan tingkat satker
 - b. Penyusunan laporan realisasi PNBP
 - c. Rekonsiliasi/ koordinasi anggaran satker dengan pusat dan kementerian kesehatan
 - d. Penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah
 - e. Penyusunan RPK/RPD
9. Dokumen pengelolaan BMN
 - a. Penyusunan laporan BMN satker dan wilayah
 - b. Rekonsiliasi/koordinasi BMN satker dengan Pusat dan Kementerian Kesehatan
 - c. Peningkatan pengelolaan BMN
 - d. Inventarisasi BMN
10. Dokumen Kepegawaian
 - a. Penyusunan perencanaan/evaluasi pegawai
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c. Pengelolaan penataan jabatan
 - d. Pelaksanaan pembinaan pegawai
 - e. Koordinasi/konsultasi kepegawaian
 - f. Peningkatan kapasitas pegawai

Secara keseluruhan dokumen yang di hasilkan adalah sebanyak 56 dokumen, yang terdiri dari :

Tabel 3.2
Distribusi Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
Tahun 2019

No	Dokumen	Target	Realisasi	Capaian
1	LAKIP	1	1	100%
2	Laporan Tahunan	1	1	100%
3	Profil	1	1	100%
4	RKAKL/DIPA	2	4	200%
5	Laporan Bulanan	12	12	100%
6	Laporan Keuangan	2	2	100%
7	Laporan BMN	2	2	100%
8	Proposal PNBP	1	1	100%
9	Laporan Kepegawaian	2	2	100%
10	E Money Bappenas	12	16	133,33%
11	E Money DJA	12	14	116,66%
	Jumlah	48	56	116,67%

11. INDIKATOR KESEBELAS

Jumlah Peningkatan kapasitas SDM Bidang P2P

a. Definisi Operasional

- Peningkatan kapasitas adalah kegiatan yang diikuti untuk dapat meningkatkan kualitas pegawai

b. Rumus/ Cara Perhitungan

$$\text{Capaian pelatihan yang diikuti} = \frac{\text{Jumlah pelatihan yang diikuti}}{\text{Jumlah pelatihan yang ditargetkan}} \times 100\%$$

$$246,15\% = 32 / 13 \times 100\%$$

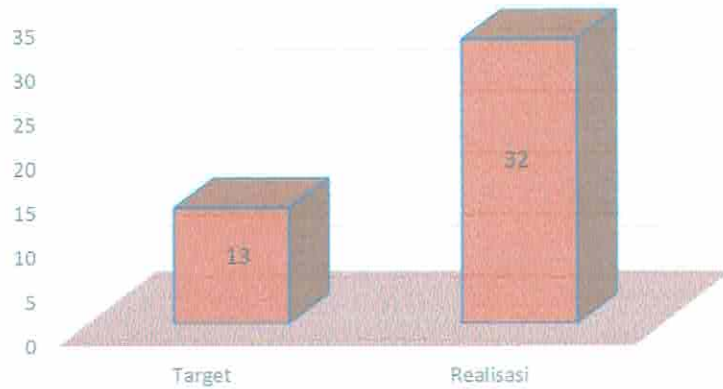
c. Capaian Indikator

Capaian indikator kinerja peningkatan kapasitas SDM bidang P2P di KKP Kelas II Padang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Distribusi Pelatihan di KKP Kelas II Padang Tahun 2019

NO	Kegiatan	Pelaksanaan
1	ACLS	Februari
2	BTCLS	Februari
3	Bendahara	Februari
4	Pengendalian Vektor dan BPP	Feb
5	Wokshop Simkespel	Februari
6	Bimtek kearsipan dan administrasi	Februari
7	Vaksinologi	Maret
8	Pengawasan tindakan Hapus Tikus	Maret
9	Dklat pengelolaan alat dan bahan pengendalian vektor dan BPP	Maret
10	Bimtek Perpres 16 th 2018	Maret
11	TKHI	April
12	Kekarantinaan tingkat dasar	April
13	Jiwa Korsa	Mei
14	Workshop BMN	Mei
15	Workshop kesehatan lingkungan	Juni
16	GIS	Juni
17	PBJ	Juni
18	Bimtek PUPR	Juni
19	Faktor Resiko Lingkungan	Juni
20	Penyehatan alat angkut	juli
21	ACLS for Nurse	Agustus
22	Basic Sea Survival	September
23	Pelatihan Jabfung Entomolog	September
24	Pelatihan SIG untuk survei vektor dan binatang pengganggu	September
25	Workshop Penggunaan Aplikasi SIPEKA	September
26	Workshop Surveilans Migrasi Malaria	Oktober
27	Pelatihan operasionalisasi peralatan deteksi KKM	Oktober
28	JFT Epidemiologi	Oktober
29	Pelatihan Petugas Vaksinasi International	November
30	JFT Sanitarian	November
31	Kesehatan Haji	Desember
32	Workshop Jabfung Perawat	Desember

Grafik. 3.21
 Realisasi Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P
 KKP Kelas II Padang Tahun 2019



Dari grafik terlihat bahwa realisasi jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang PSP melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 13 kegiatan pelatihan dengan realisasi sebanyak 32 kegiatan peningkatan kapasitas SDM (246,15%). Kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dapat bersumber dari dana DIPA KKP Kelas II Padang dapat juga dari unit utama yakni Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

12. INDIKATOR KEDUA BELAS

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana

a. Definisi Operasional

Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam 1 tahun

b. Rumus/ CaraPerhitungan

$$\text{Capaian pengadaan sarana prasarana} = \frac{\text{Jumlah pengadaan sarana prasarana dalam satu tahun}}{\text{Jumlah pengadaan sarana prasarana yang ditargetkan}} \times 100\%$$

$$188,89 \% = 17 / 9 \times 100\%$$

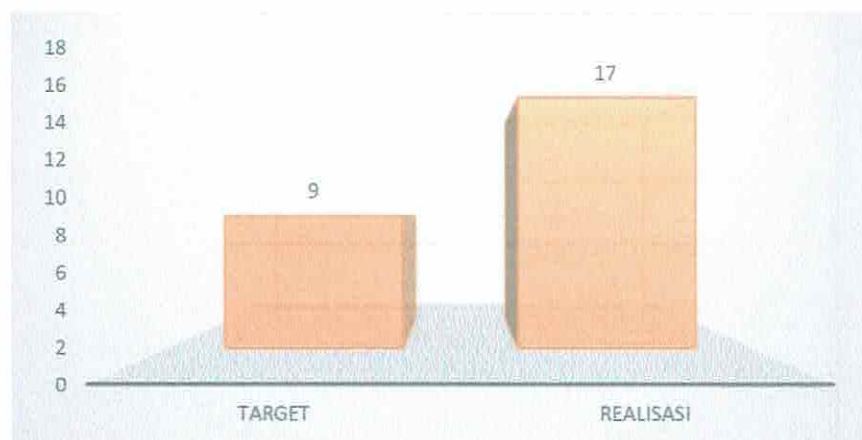
c. Capaian Indikator

Tabel 3.4
Alokasidan Realisasi Pengadaan KKP KelasII Padang Tahun 2019

No	Nama Paket	Pagu	Realisasi
	Pengadaan Kendaraan Bermotor (RM)		
1	Pengadaan Ambulance (RM)	435,000,000	434,780,000
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (PNBP)	-	
2	pengadaan Genset	191,730,000	191,730,000
3	Pengadaan Kamera DSLR	7,100,000	7,100,000
4	Pengadaan Jet Pump	2,040,000	2,040,000
5	Pengadaan APAR	4,371,000	4,370,000
6	Pengadaan Filling Cabinet	7,710,000	7,710,000
7	Pengadaan Scanner Mobile	4,100,000	4,100,000
8	Pengadaan Kulkas 2 Pintu	5,760,000	5,760,000
9	Pengadaan Karpets	21,455,000	21,400,000
10	Printer	4,000,000	3,541,500
11	AC 1 PK	5,200,000	4,190,000
12	Pengadaan Laptop	17,050,000	17,050,000
	Pengadaan Alat Kesehatan (PNBP)	-	
13	Pengadaan Kulkas Vaksin	103,000,000	102,300,000
	Peralatan dan fasilitas perkantoran (RM)	-	
14	Pengadaan Laptop	21,800,000	21,724,000
15	Pengadaan Dispenser	2,269,000	2,287,800
16	Pengadaan Lemari Arsip	4,200,000	4,200,000
17	Pengadaan Vertical Blind	19,302,000	19,302,000

Grafik 3.22

Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Prasarana
KKP Kelas II Padang Tahun 2019



Dari grafik diatas diketahui bahwa target untuk 9 unit kegiatan pengadaan sarana prasarana yang telah ditetapkan dan di realisasikan menjadi 17unit kegiatan pengadaan sarana prasarana (188,89%) hal ini dapat terlaksana dengan merevisi anggaran yang tersisa dari kegiatan pengadaan sarana prasarana.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Sumber anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang adalah DIPA Tahun 2019, senilai Rp. 16.117.323.000,- dengan realisasi sebesar Rp.115.966.697.568,- atau 99,06%

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output
KKP Kelas II Padang Tahun 2019

Output	Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2058.004	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit berpotensi KLB	139.200.000,-	137.145.800,-	98,54
2058.007	Layanan Kekeamtinaan Kesehatan	2.574.610.000,-	2.525.293.669,-	98,08
2059.005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	51.800.000,-	50.507.200,-	97,50
2059.009	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	418.800.000,-	412.366.084,-	98,46
2060.500	Layanan Pencegahan dan Pengendalian	101.604.000,-	100.408.700,-	98,82

	Penyakit HIV AIDS			
2060.502	Layanan Pengendalian Penyakit TB	95.000.000,-	89.821.300,-	94,54
2063.951	Layanan Sarana Prasarana Internal	857.337.000,-	854.835.300,-	99,70
2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.109.037.000,-	1.054.770.730,-	95,10
2063.994	Layanan Perkantoran	10.769.935.000,-	10.741.548.785,-	99,73
Jumlah		16.117.323.000,-	15.966.697.568,-	99,06

Sebagian besar anggaran KKP Kelas II Padang tahun 2019 dipergunakan untuk layanan perkantoran (gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran)

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja
KKP Kelas II Padang Tahun 2019

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	8.231.940.000,-	8.228.438.998,-	99,95
2	Belanja Barang	7.028.046.000,-	6.881.393.270,-	97,21
3	Belanja Modal	857.337.000,-	854.835.300,-	99,70

Realisasi belanja pegawai KKP Kelas II Padang tahun 2019 sebesar Rp.8.228.438.998,-atau 99,95%. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan . Belanja barang sebesar Rp.6.881.393.270,- atau 97,21% digunakan untuk membiayai layanan perkantoran dan kegiatan-kegiatan dari seksi/ bagian untuk pencapaian indicator kerja. Belanja modal sebesar Rp.857.337.000,-atau 99,70% digunakan untuk pengadaan kendaran ambulance serta pengadaan fasilitas perkantoran

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan
KKP Kelas II Padang Tahun 2019

No.	Sumber Pembiayaan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni	12.406.503.000,-	12.311.864.444,-	99,24
2	PNBP	3.711.270.000,-	3.644.390.574,-	98,20
Jumlah		16.117.323.000,-	115.966.697.568,-	99,06

2. Efisiensi Sumber Daya

Untuk menjamin semua indikator dalam perjanjian kinerja tetap mencapai target beberapa upaya dibawah ini telah dilakukan yakni:

1. Menggabungkan beberapa pertemuan menjadi satu pertemuan.
2. Mempersingkat tahapan kegiatan tetapi tetap mempertahankan materi dan esensi kegiatan.
3. Melakukan monitoring evaluasi terintegrasi dengan program lain seperti monitoring program penyehatan alat angkut dilakukan terintegrasi bersama dengan seksi -seksi yang terlibat didalamnya
4. Melakukan revisi anggaran tanpa merubah pagu anggaran untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dalam kegiatan prioritas

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja KKP Kelas II Padang Tahun 2019

NO	Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
				Anggaran	Kinerja	Efisiensi
1	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit berpotensi KLB	139.200.000	137.145.800	98,54	126,83	28,29
2	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	2.574.610.000	2.525.293.669	98,08	94,15	-3,93
3	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	51.800.000	50.507.200	97,50	100	2,50
4	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	418.800.000	412.366.084	98,46	100	1,54
5	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Menular Langsung	196.604.000	190.230.000	96,75	165,50	68,75
6	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	12.736.309.000	12.651.154.815	99,33	135,18	35,85
	Jumlah	16.117.323.000	15.966.697.568	99,06	120,27	22,16

Dari tabel 3.8 dapat dilihat beberapa hal antara lain:

1. Realisasi anggaran KKP Kelas II Padang tahun 2019 sebesar 99,06 % sedangkan realisasi kinerja sebesar 120,27 % dengan efisiensi sebesar 22,16%
2. Efisiensi tertinggi berada di Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sebesar 68,75%. Hal ini disebabkan perhitungan capaian kinerja diukur dari 2

indikator capaian yaitu Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS dan Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB . Pencapaian kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS 270% dan pencapaian kinerja Pencegahan dan pengendalian penyakit TB 102,8%.

3. Realisasi kinerja terendah berada di Layanan Kekejarantinan Kesehatan dimana anggaran yang direalisasikan lebih besar (98,08%) dari pada kinerja yang dihasilkan (94,15%)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran dan tingkat pencapaian kegiatan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Tahun 2019 telah mencapai hasil yang cukup memuaskan yaitu rata-rata 127,42%. Pencapaian kinerja yaitu pencapaian indikator sasaran pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Tahun 2019 pada umumnya telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015 – 2019. Meskipun demikian ada beberapa indikator sasaran lagi yang harus ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang pada tahun-tahun berikutnya, diharapkan para Pelaksana Program melakukan evaluasi dan meningkatkan mutu perencanaan, lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, koordinasi rutin, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Jalil Alfani, M.Kes
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M.Kes
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 14.781.359.000, berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP 196003201985021002



Pihak Pertama,

dr. Jalil Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/ kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	5.200 Sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di wilayah layanan KKP	100%
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	1.235 Sertifikat
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	19 Layanan
		5. Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 Pelabuhan
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	23.500 Sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	5 Pelabuhan
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	5 Pelabuhan
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	700 Orang
4	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas lainnya	48 Dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	13 Pelatihan
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	9 Paket

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG
TAHUN 2019**

NO (1)	OUTPUT RKAKL (2)	TARGET (3)	ANGGARAN (4)
1	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB	1 Layanan	Rp. 139.200.000,-
	a. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB di KKP	1 Layanan	Rp. 139.200.000,-
2	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	859 Layanan	Rp. 2.574.610.000,-
	a. Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di KKP	5 Layanan	Rp. 2.273.802.000,-
	b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC (<i>Ship Sanitation Control Certificate/ Ship Sanitation Control Exemption Certificate</i>)	110 Layanan	Rp. 52.800.000,-
	c. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (<i>Certificate of Pratique</i>)	300 Layanan	Rp. 165.000.000,-
	d. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC (<i>Port Health Quarantine Clearance</i>)	440 Layanan	Rp. 82.280.000,-
	e. Layanan Kekarantinaan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	4 Layanan	Rp. 728.000,-
3	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	1 Layanan	RP. 51.800.000,-
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD	1 Layanan	RP. 51.800.000,-
4	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	405 Layanan	Rp. 418.800.000,-
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan, Bandara/PLBD	1 Layanan	Rp. 233.322.000,-
	b. Layanan Pengendalian Vektor DBD	50 Layanan	Rp. 42.750.000,-
	c. Layanan Survey Vektor Pes	24 Layanan	Rp. 49.728.000,-
	d. Layanan Pengendalian Vektor Diare	30 Layanan	Rp. 12.810.000,-
	e. Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5 Layanan	Rp. 6.135.000,-
	f. Layanan Survey Vektor DBD	250 Layanan	Rp. 41.250.000,-
	g. Layanan Survey Vektor Diare	15 Layanan	Rp. 9.450.000,-
	h. Layanan Survey Vektor Malaria	30 Layanan	Rp. 23.355.000,-
5	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	9 Layanan	Rp. 101.604.000,-
	a. Deteksi Dini HIV AIDS	1 Layanan	Rp. 79.804.000,-
	b. Layanan Tes HIV dan IMS di KKP	8 Layanan	Rp. 21.800.000,-
6	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	11 Layanan	Rp. 95.000.000,-
	a. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC (UPT/KKP)	1 Layanan	49.450.000,-
	b. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC Wilayah Kerja KKP	10 Layanan	Rp. 45.550.000,-
7	Layanan Serana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 857.337.000,-
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 1.109.037.000,-
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 9.433.971.000,-
Total			Rp. 14.781.359.000

No	Kegiatan	Anggaran
1	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp. 2.713.810.000,-
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp. 470.600.000,-
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp. 196.604.000,-
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 11.400.345.000,-
Total		Rp. 14.781.359.000,-

Direktur Jenderal P2P



Dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP 196003201985021002



Jakarta, Desember 2018

Kepala KKP Kelas II Padang

dr. Jali Alfani, M.Kes
NIP 196603111999031001